ISSN 2621- 458X

HAMBATAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DESA MELALUI DESATA DI DESA MADELLO, KABUPATEN BARRU

Dewi Sakina Rahmadani K
Program Studi Magister Administrasi Publik,ITBA Al Gazali Barru
dewisakinarahmadani@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital pelayanan publik di tingkat desa menuntut kesiapan data, kelembagaan, dan sumber daya manusia, bukan sekadar penyediaan aplikasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan implementasi tahap awal DESATA di Desa Madello, Kabupaten Barru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tiga informan kunci, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan admin DESATA, pada 21 Oktober 2026, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi masih berada pada tahap penginputan data penduduk, dengan sekitar 3.000 dari 4.000 data telah dimasukkan. Hambatan utama meliputi kualitas data kependudukan (kesalahan NIK dan nomor KK, data pekerjaan yang belum terisi, data tahun sebelumnya yang belum diperbarui, serta perbedaan format data), kesiapan kelembagaan yang belum optimal, alokasi anggaran APBDes yang masih direncanakan, aplikasi yang masih dalam penyempurnaan sehingga memerlukan koordinasi berkala dengan pengelola, dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum dilaksanakan sehingga fitur layanan belum dapat dimanfaatkan. Kesiapan operator dan dukungan jaringan internet dinilai relatif baik. Hambatan DESATA di Desa Madello dengan demikian lebih bersifat struktural dan berkaitan dengan data serta tata kelola daripada kemampuan teknis operator. Penelitian merekomendasikan verifikasi data bersama RT, perencanaan anggaran dalam APBDes, pendampingan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Barru, dan sosialisasi yang memperkuat literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: *digitalisasi desa; kualitas data kependudukan; kesiapan kelembagaan; e-government; studi kasus*

ABSTRACT

Digital transformation of public services at the village level requires readiness in data, institutions, and human resources, not merely the provision of an application. This study aims to identify the barriers to the early-stage implementation of DESATA in Madello Village, Barru Regency. The study employed a descriptive qualitative approach with an intrinsic case study design. Data were collected through interviews with three key informants, namely the village head, the village secretary, and the DESATA administrator, on 21 October 2026, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing with source triangulation. The results show that implementation is still at the stage of entering resident data, with about 3,000 of 4,000 records entered. The main barriers include the quality of population data (errors in national ID and family card numbers, missing occupation data, outdated records from the previous year, and differing data formats), institutional readiness that is not yet optimal, a village budget allocation that is still being planned, an application that is still being refined and therefore requires

regular coordination with its manager, and community outreach that has not yet been carried out, so service features cannot yet be used. Operator readiness and internet connectivity were assessed as relatively good. The barriers to DESATA in Madello Village are therefore more structural and related to data and governance than to the technical ability of the operator. The study recommends data verification with neighborhood units (RT), village budget planning, continuous assistance from the Barru Regency Government, and outreach that strengthens digital literacy.

Keywords: *village digitalization; population data quality; institutional readiness; e-government; case study*

lisensi CC BY

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital pelayanan publik menjadi agenda penting pemerintah di semua tingkat, termasuk desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Transformasi digital dipahami bukan sekadar pengadaan aplikasi, melainkan upaya menyeluruh meninjau ulang proses dan layanan yang digerakkan teknologi digital dan menuntut penyesuaian organisasi (Mergel et al., 2019). Di tingkat desa, perubahan ini menghadapi persoalan yang berulang, yaitu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparatur, kebutuhan pelatihan, serta ketersediaan infrastruktur (Sihombing & Lumbantobing, 2024). Studi di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah desa dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dan desa terhadap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta investasi pada kemampuan digital aparatur (Faozanudin et al., 2023).

Persoalan serupa muncul pada berbagai sistem informasi desa. Digitalisasi layanan desa dapat meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan, tetapi manfaatnya tidak merata karena rendahnya literasi digital kelompok usia lanjut, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kesadaran masyarakat menghambat adopsi (Fauziah et al., 2025). Penelitian lain menemukan bahwa kapabilitas adaptif sumber daya manusia di sebuah desa masih berada pada tingkat dasar sehingga transformasi digital yang sesungguhnya belum tercapai meskipun infrastruktur tersedia (Permatasari & Khair, 2026). Pendampingan yang berkelanjutan dan peningkatan literasi digital aparatur juga dipandang penting untuk mendukung adaptasi desa (Eprilianto et al., 2021; Imam Dinata et al., 2026). Dari sisi tata kelola, kapasitas organisasi yang mencakup strategi, kepemimpinan, unit pelaksana, dan kolaborasi menentukan transformasi digital pemerintah daerah sehingga diperlukan strategi yang tidak hanya teknis (Gasco-Hernandez et al., 2022), dan

kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak lain ditekankan dalam pendekatan ko-produksi (Edelmann & Mergel, 2021; Susanti et al., 2023).

Desa Madello, Kabupaten Barru, mulai menerapkan DESATA, platform digitalisasi desa yang diwajibkan Pemerintah Kabupaten Barru agar warga dapat mengurus persuratan lebih cepat tanpa harus selalu datang ke kantor desa. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, implementasi masih berada pada tahap penginputan data penduduk sehingga fitur pelayanan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang hambatan apa yang menahan perpindahan dari pendataan menuju pelayanan digital. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan implementasi tahap awal DESATA di Desa Madello. Artikel ini memberikan gambaran empiris hambatan pada saat data masih dibangun sehingga dapat menjadi masukan bagi desa lain yang berada pada tahap serupa.

B. METODE PENELITIAN

1) Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik. Kasus Desa Madello dipelajari untuk memahami kasus itu sendiri, bukan untuk menggeneralisasi ke seluruh desa. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada aparatur desa juga digunakan dalam penelitian tentang kapabilitas adaptif sumber daya manusia pada transformasi digital desa (Permatasari & Khair, 2026).

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian disusun dari literatur dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Transformasi digital dipahami sebagai perubahan yang tidak hanya bersifat teknis (Mergel et al., 2019), sehingga hambatannya ditelaah pada beberapa dimensi: kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan serta komitmen anggaran (Faozanudin et al., 2023; Permatasari & Khair, 2026), hambatan organisasional dan dukungan (Gasco-Hernandez et al., 2022), serta kesiapan pengguna layanan (Fauziah et al., 2025). Dimensi tersebut diterapkan pada tahap awal DESATA di Desa Madello, seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Hambatan Implementasi DESATA

Sumber: Diolah penulis (2026) berdasarkan Mergel et al. (2019), Faozanudin et al. (2023), Gasco-Hernandez et al. (2022), dan Permatasari & Khair (2026)

3) Lokasi, Waktu, dan Informan

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Madello, Kabupaten Barru, pada 21 Oktober 2026. Informan ditetapkan secara purposif berdasarkan peran langsung dalam pelaksanaan DESATA, yaitu Kepala Desa (kebijakan dan dukungan), Sekretaris Desa (koordinasi kelembagaan dan pendataan), dan Admin DESATA (operasional penginputan data). Identitas informan dirahasiakan dan hanya ditulis berdasarkan jabatan, seperti pada Tabel 1. Dokumentasi pelaksanaan wawancara dan platform DESATA disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode	Jabatan	Peran dalam DESATA	Masa Jabatan
I-1	Kepala Desa	Penentu kebijakan dan pemberi dukungan implementasi	2018–sekarang
I-2	Sekretaris Desa	Koordinasi kelembagaan dan pendataan	2016–sekarang
I-3	Admin DESATA	Operator penginputan data warga	Oktober 2026–sekarang

Sumber: Hasil wawancara penelitian (2026)

4) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang terdiri atas 10 pertanyaan untuk Kepala Desa, 10 pertanyaan untuk Sekretaris Desa, dan 11 pertanyaan untuk Admin DESATA. Pertanyaan mencakup tahapan implementasi, peran kepemimpinan, kesiapan aparatur dan data, anggaran, sosialisasi, kendala teknis, serta dukungan eksternal. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan jawaban ketiga informan pada topik yang sama, misalnya kesiapan aparatur dan kondisi data. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data berasal dari wawancara dan belum dilengkapi observasi atau dokumen, serta seluruh informan berasal dari pemerintah desa sehingga perspektif masyarakat belum tercakup.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Implementasi DESATA di Desa Madello

Menurut Kepala Desa, penerapan DESATA merupakan kebijakan yang diwajibkan Pemerintah Kabupaten Barru, dan pemerintah desa berharap pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Tujuan utamanya adalah memudahkan warga mengakses layanan administrasi dan mengurus persuratan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Saat penelitian dilakukan, implementasi berada pada tahap penginputan data penduduk, dan data yang selesai diinput akan diverifikasi sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. Admin DESATA menyebutkan bahwa sekitar 3.000 dari target 4.000 data warga telah dimasukkan, atau sekitar 75 persen. Posisi ini menunjukkan bahwa Desa Madello berada pada fase digitalisasi data, yaitu fondasi yang harus selesai sebelum layanan dapat berjalan. Temuan ini sejalan dengan catatan Sihombing dan Lumbantobing (2024) bahwa proses digitization dan digitalization sering terabaikan dalam transformasi digital administrasi desa.

2) Hambatan Kualitas dan Kelengkapan Data Kependudukan

Hambatan yang paling banyak dikemukakan berkaitan dengan data. Admin DESATA menjelaskan bahwa data awal bersumber dari arsip desa yang dikerjakan masing-masing RT sehingga proses input relatif mudah, tetapi masih ditemukan kesalahan penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) serta data yang belum terisi, misalnya

pekerjaan warga. Sebagian data juga masih menggunakan data tahun sebelumnya sehingga tidak sesuai kondisi terkini, seperti warga yang telah meninggal dunia atau pindah domisili. Format data sebelumnya berbeda dengan format DESATA sehingga diperlukan penyesuaian, dan pencocokan ulang membuat penginputan memakan waktu lama. Sekretaris Desa membenarkan bahwa data warga masih dalam proses pemutakhiran dan sebagian belum diinput. Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa terus melakukan pendataan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan data sebelum digunakan dalam DESATA, serta bahwa kendala administratif yang berpotensi muncul berupa dokumen kependudukan yang tidak lengkap, data warga yang tidak sesuai, dan perlunya pengecekan serta pencocokan data sebelum diinput. Potensi kendala tersebut sejalan dengan pengalaman Admin DESATA di lapangan. Kepala Desa juga menyebut data warga yang belum lengkap sebagai hambatan awal. Kesesuaian keterangan ketiga informan ini menunjukkan bahwa kualitas data merupakan hambatan inti pada tahap awal.

Hambatan ini tidak dapat diatasi dengan mempercepat input saja. Data yang keliru atau kedaluwarsa, bila dimasukkan apa adanya, dapat memindahkan masalah ke dalam sistem digital dan menurunkan keandalan layanan persuratan yang kelak bergantung pada data tersebut. Karena sumber data berasal dari RT, diperlukan mekanisme verifikasi dan pembaruan berkala yang melibatkan RT dan warga, sebagaimana ditekankan Sekretaris Desa bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung kelengkapan data. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan gagasan ko-produksi dalam transformasi digital desa (Susanti et al., 2023).

3) Hambatan Kesiapan Kelembagaan dan Anggaran

Kepala Desa menilai kesiapan aparatur, khususnya admin DESATA, sudah sangat baik, meskipun ia juga menyebut bahwa aparatur masih perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan platform. Sekretaris Desa menyatakan bahwa koordinasi antarpihak berjalan baik dan Kepala Seksi Pemerintahan berperan berkoordinasi dengan Sekretaris Desa dan Kepala Desa untuk melengkapi data, tetapi ia menilai kesiapan kelembagaan belum sepenuhnya optimal karena data masih dalam proses pemutakhiran dan sebagian data warga belum diinput. Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa kesiapan individu operator belum otomatis berarti kesiapan institusi. Dari sisi anggaran, Kepala Desa menyatakan bahwa alokasi untuk perangkat, internet, pelatihan, dan pendampingan masih dalam tahap perencanaan dan perlu dipertimbangkan dalam APBDes.

Sekretaris Desa menyampaikan hal serupa, yaitu bahwa pengalokasian anggaran dalam APBDes perlu dipertimbangkan agar platform dapat diselenggarakan dengan baik.

Belum adanya alokasi yang pasti berpotensi mengganggu keberlanjutan. Studi di Kabupaten Banyumas menemukan bahwa kurangnya fokus dan komitmen pemerintah daerah dan desa terhadap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta terbatasnya investasi pada kemampuan digital aparatur, memengaruhi kesiapan desa (Faozanudin et al., 2023). Pada tahap input, ketiadaan alokasi belum menimbulkan gangguan yang nyata karena kebutuhan masih terbatas pada pendataan, tetapi perencanaan anggaran akan menentukan ketika layanan mulai digunakan warga.

4) Hambatan Koordinasi dengan Pengelola Aplikasi

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa DESATA saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan sehingga koordinasi antara pemerintah desa dan pengembang atau pengelola perlu dilakukan secara berkala, termasuk setiap bulan. Admin DESATA mengaku belum mengetahui secara pasti kendala teknis pada aplikasi karena masih berfokus pada penginputan data penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, kelancaran implementasi bergantung pada pengelola yang masih menyempurnakan platform, sehingga koordinasi berkala perlu dijaga agar kebutuhan desa dapat disampaikan dan ditindaklanjuti. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa lemahnya koordinasi dan ketidakjelasan unit pelaksana dalam organisasi menyulitkan transformasi digital pemerintah daerah, bukan semata persoalan teknis (Gasco-Hernandez et al., 2022).

5) Faktor Pendukung: Kesiapan Operator dan Sarana

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung. Admin DESATA menilai platform cukup mudah dan sederhana dioperasikan, mengaku telah memperoleh pelatihan, dan menyatakan dirinya sangat siap. Dukungan perangkat dan jaringan dinilai memadai karena menggunakan Wi-Fi. Kepala Desa menyebutkan bahwa bimbingan teknis (Bimtek) telah diikuti oleh admin. Temuan ini berbeda dengan studi di Kabupaten Toba, yang menemukan banyak aparatur desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan administrasi digital (Sihombing & Lumbantobing, 2024), dan dengan kegiatan di Lombok Barat, yang masih menghadapi keterbatasan perangkat serta akses internet yang tidak stabil (Imam Dinata et al., 2026). Di Desa Madello, hambatan utama dengan demikian bukan infrastruktur atau keterampilan dasar operator, melainkan data dan tata kelola.

Meski demikian, temuan ini perlu dibaca hati-hati. Penilaian kesiapan bersifat penilaian diri dan penilaian atasan, Admin DESATA baru menjabat sejak Oktober 2026, dan pekerjaannya masih sebatas penginputan. Kemampuan yang dibutuhkan pada tahap layanan, seperti verifikasi, penerbitan surat, dan penanganan keluhan warga, belum teruji. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa ketersediaan infrastruktur tidak otomatis menghasilkan transformasi digital yang sesungguhnya apabila kapabilitas sumber daya manusia masih berada pada tingkat dasar (Permatasari & Khair, 2026).

6) Hambatan Sosialisasi dan Kesiapan Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat belum dilaksanakan. Menurut Kepala Desa, sosialisasi direncanakan melalui kepala dusun yang menyampaikan informasi lewat pengeras suara masjid setelah data diverifikasi. Selama data belum lengkap dan sosialisasi belum berjalan, fitur pelayanan administrasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan warga belum menjadi pengguna layanan. Rencana tersebut mampu menjangkau banyak warga, tetapi bersifat satu arah dan terutama memberi tahu keberadaan platform, belum tentu membangun kemampuan warga untuk menggunakannya.

Pengalaman daerah lain menunjukkan pentingnya kesiapan pengguna. Di Desa Sumurkondang, Cirebon, rendahnya literasi digital pada warga yang lebih tua dan kurangnya kesadaran masyarakat menghambat pemanfaatan layanan digital (Fauziah et al., 2025), sedangkan kegiatan di Desa Mareje menunjukkan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta (Imam Dinata et al., 2026). Perspektif ko-produksi juga melibatkan pengguna layanan sebagai kontributor dan mitra dalam menciptakan nilai publik, dengan pelibatan yang sebaiknya dilakukan sejak dini (Edelmann & Mergel, 2021). Karena itu, sosialisasi di Desa Madello perlu dilengkapi dengan pendampingan bagi warga yang belum terbiasa dengan layanan digital.

7) Upaya dan Dukungan yang Diharapkan

Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa adalah mengikuti Bimtek bagi admin dan mulai menginput data penduduk, dan ke depan penginputan akan dilanjutkan secara bertahap sampai data lengkap. Sekretaris Desa menambahkan bahwa kemajuan implementasi dinilai dari hasil pendataan dan kelengkapan data seluruh bidang di desa, dan aparatur akan diarahkan untuk melengkapi data yang masih kurang. Pemerintah desa mengharapkan pendampingan dan

dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya bimbingan teknis, peningkatan kemampuan aparatur, dan bantuan ketika terdapat kendala penggunaan platform, serta dukungan teknis agar penginputan berjalan lancar. Harapan ini selaras dengan rekomendasi agar pemerintah kabupaten meningkatkan dukungan dan pendampingan kepada desa serta kegiatan peningkatan kapasitas aparatur (Sihombing & Lumbantobing, 2024). Kepemimpinan, kolaborasi, dan dukungan pendanaan yang memadai juga dinilai menentukan kapasitas organisasi dalam transformasi digital pemerintah daerah (Gasco-Hernandez et al., 2022), dan pendampingan tata kelola digital telah dipraktikkan untuk membantu desa beradaptasi (Eprilianto et al., 2021). Tabel 2 (dua) merangkum hambatan dan faktor pendukung yang ditemukan.

Tabel 2 Rekapitulasi Hambatan dan Faktor Pendukung Implementasi DESATA

Dimensi	Temuan Utama	Informan
Kualitas dan kelengkapan data	Kesalahan NIK dan nomor KK, data pekerjaan belum terisi, data tahun sebelumnya belum diperbarui, format data berbeda; progres sekitar 3.000 dari 4.000 data	I-1, I-2, I-3
Kesiapan kelembagaan dan anggaran	Kesiapan kelembagaan belum optimal; alokasi anggaran masih tahap perencanaan dalam APBDes	I-1, I-2
Koordinasi dengan pengelola aplikasi	Aplikasi masih dalam pengembangan dan penyempurnaan; koordinasi berkala dengan pengembang atau pengelola, termasuk setiap bulan, diperlukan	I-2 (I-3 belum mengetahui kendala teknis secara pasti)
Sosialisasi dan kesiapan masyarakat	Sosialisasi belum dilaksanakan; rencana melalui kepala dusun dan pengeras suara masjid; fitur layanan belum dimanfaatkan	I-1
Faktor pendukung	Operator merasa siap, platform dinilai mudah, pelatihan dan Bimtek telah diikuti, jaringan Wi-Fi memadai	I-1, I-3

Sumber: Hasil analisis data wawancara (2026)

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hambatan implementasi tahap awal DESATA di Desa Madello terutama bersifat struktural dan berpusat pada data, bukan pada kemampuan teknis operator. Hambatan tersebut meliputi kualitas dan kelengkapan data kependudukan, kesiapan kelembagaan yang belum optimal, anggaran APBDes yang masih direncanakan, aplikasi yang masih disempurnakan sehingga

memerlukan koordinasi berkala dengan pengelola, serta sosialisasi yang belum dilaksanakan sehingga fitur layanan belum dapat dimanfaatkan warga. Kesiapan operator dan dukungan jaringan internet menjadi faktor pendukung. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa kesiapan transformasi digital desa bersifat multidimensi, mencakup individu, data, kelembagaan, anggaran, dan masyarakat, sehingga tidak identik dengan ketersediaan aplikasi (Mergel et al., 2019).

Berdasarkan temuan tersebut, saran bagi pemerintah desa adalah menyusun mekanisme verifikasi dan pembaruan data bersama RT, memasukkan kebutuhan perangkat, internet, pelatihan, dan pendampingan DESATA ke dalam perencanaan APBDes, menjaga koordinasi berkala dengan pengelola aplikasi, termasuk menyampaikan kendala penggunaan yang muncul, serta merancang sosialisasi dua arah yang disertai pendampingan warga. Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, pendampingan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan diperlukan agar desa dapat bergerak dari pendataan menuju pelayanan. Penelitian ini terbatas pada tiga informan dari pemerintah desa, bersumber dari wawancara, dan dilakukan pada tahap awal implementasi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan observasi, dokumen, dan perspektif warga, serta menilai kembali hambatan setelah layanan DESATA mulai digunakan.

➢ UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Admin DESATA Desa Madello yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., M.H., selaku dosen Program Studi Magister Administrasi Publik, Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan dalam proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Edelmann, N., & Mergel, I. (2021). Co-production of digital public services in Austrian public administrations. *Administrative Sciences*, *11*(1), Article 22. https://doi.org/10.3390/admsci11010022

Eprilianto, D. F., Lestari, Y., Megawati, S., & Oktariyanda, T. A. (2021). Pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era new normal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 767–776. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2587

Faozanudin, M., Rosyadi, S., & Sulistiani, L. S. (2023). The preparedness of village governments for the digital transformation of public services in Banyumas Regency, Indonesia. *Public Policy and Administration*, *22*(4), 448–462. https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-4-05

Fauziah, M. I., Nurjaman, F., Firizki, R. S., Fitriyanti, E., & Suryalaksana, A. (2025). Utilization of digitalization in improving the quality of services and information in Sumurkondang Village, Cirebon. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, *4*(10), 1288–1294. https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.858

Gasco-Hernandez, M., Nasi, G., Cucciniello, M., & Hiedemann, A. M. (2022). The role of organizational capacity to foster digital transformation in local governments: The case of three European smart cities. *Urban Governance*, *2*(2), 236–246. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.09.005

Imam Dinata, M., Alodia Yusuf, S. A., Idham, & Rasikhun, H. (2026). Peningkatan literasi digital untuk administrasi Desa Mareje dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. *Jurnal Teknologi Informasi untuk Masyarakat*, *4*(1), 46–53. https://doi.org/10.29408/jt.v4i1.35053

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, *36*(4), Article 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Permatasari, M., & Khair, O. I. (2026). Digital transformation at the village government: A human resources adaptive capability analysis. *Annals of Human Resource Management Research*, *6*(2), 277–289. https://doi.org/10.35912/ahrmr.v6i2.3704

Sihombing, T., & Lumbantobing, R. D. H. (2024). Digital technology adoption for village public administration—Evidence from Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, *8*(4), Article 3444. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.3444

Susanti, E., Harta, R., Diana, B. A., & Utami, S. B. (2023). A co-production model of digital village transformation in Indonesia. *Public Policy and Administration*, *22*(4), 488–502. https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-4-08